



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

### Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
  - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
  - d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2026

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
11. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
17. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
20. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
21. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
28. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
29. Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
30. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

31. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
32. Biro Umum Setda Provinsi Bali.
33. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
34. Badan Penghubung Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





**RENCANA KERJA (RENJA) SEMESTA BERENCANA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI BALI  
2025**

## KATA PENGANTAR

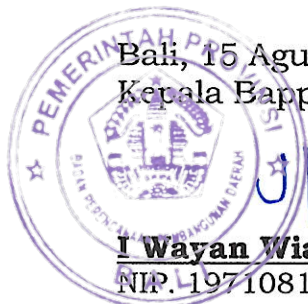
Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2026. Dalam Renja Perangkat Daerah berisikan antara lain hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu sebagai pedoman atas penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja), selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan masukan yang membangun kami harapkan dari berbagai pihak sehingga dalam tahapan penyusunan selanjutnya dapat lebih disempurnakan.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Bappeda Provinsi Bali,



**I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19710814 200003 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	58
<b>Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....</b>	<b>59</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan .....	63
<b>Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....</b>	<b>68</b>
4.1 Analisis Perencanaan Responsif Berbasis Gender.....	90
<b>Bab V Penutup.....</b>	<b>93</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.2	Realisasi fisik Keuangan Renja 2024 serta permasalahannya .....	27
Tabel 2.3	Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran/Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 .....	36
Tabel 2.4	Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	38
Tabel 2.5	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran ( <i>dampak/impact</i> ) Pemerintah Daerah.....	41
Tabel 2.6	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran ( <i>dampak/impact</i> ) Pemerintah Daerah.....	42
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 .....	62
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....	64
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 .....	70
Tabel 4.2	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali ...	90

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 .....	2
Gambar 1.2	Kedudukan RKPD dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah .....	3
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan terhadap Renja Tahun 2026 .....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

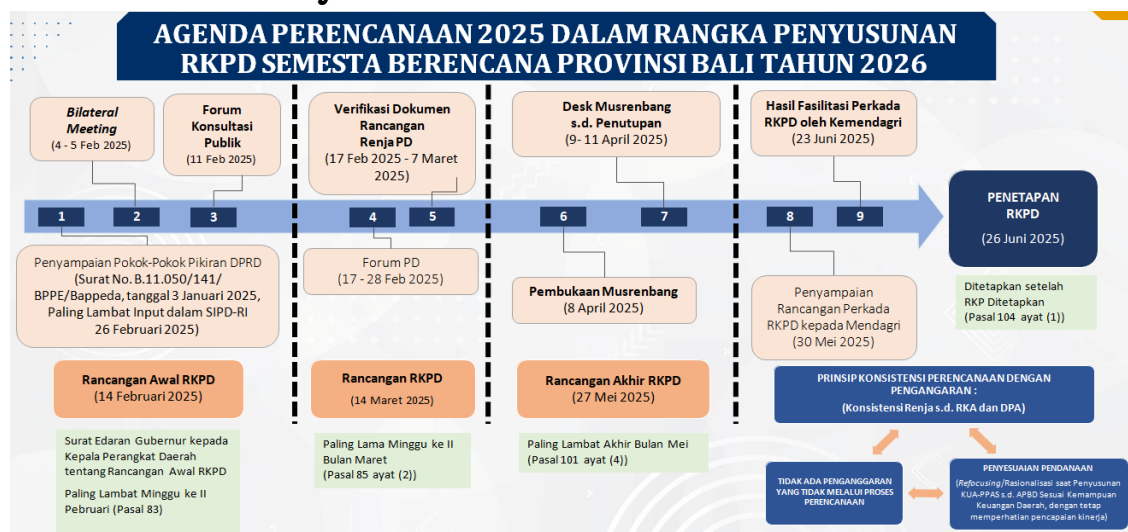
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanananaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow program* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD.

Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026**



RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD Semesta Berencana merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

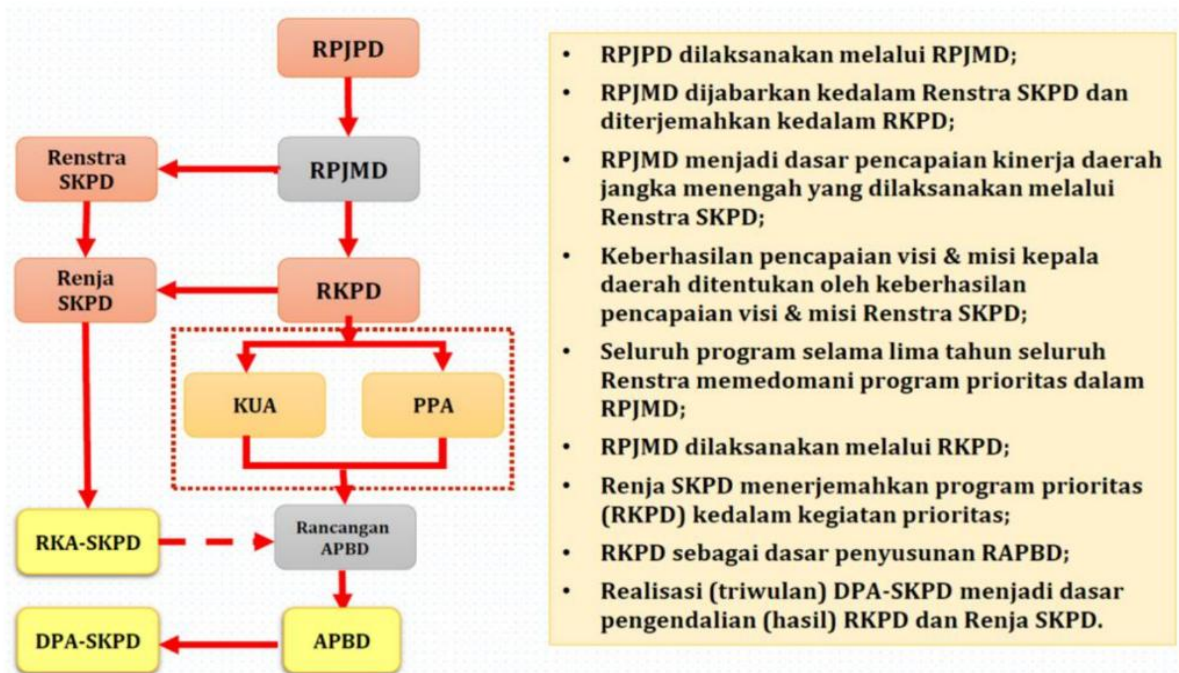
penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 adalah sebagai penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD:

**Gambar 1.2**

**Kedudukan RKPD dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah**



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagai organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu “Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menetapkan tujuan Perangkat Daerah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, dengan 2 (dua) sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sesuai dengan pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses dokumen perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2026. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja), selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026

### **Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, baik pada level nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan merupakan dasar dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah atau unit kerja pada tahun berjalan.

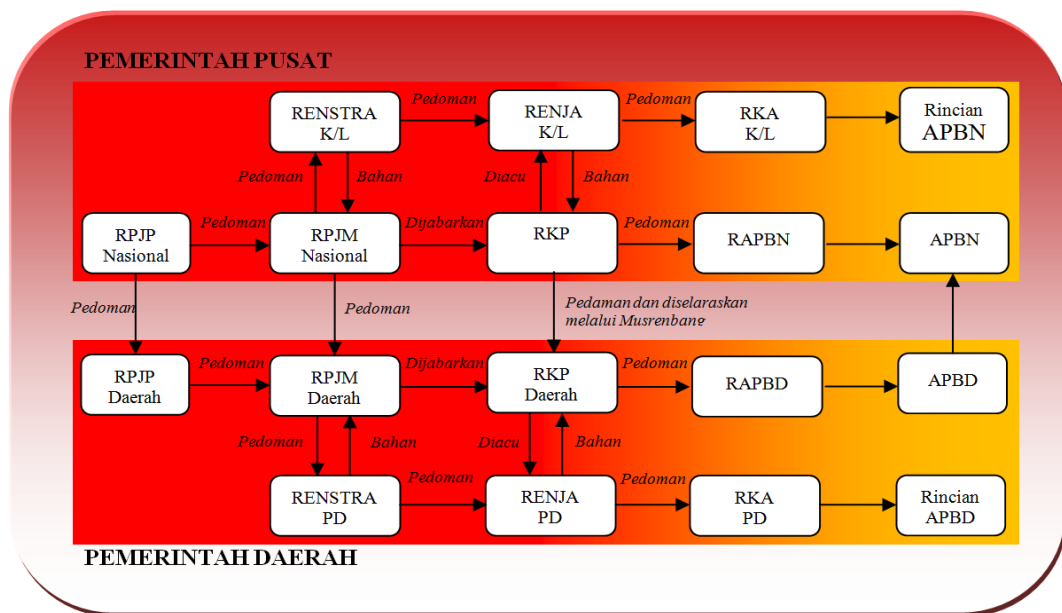
Secara hierarkis, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokok-pokok kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan Selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026

Keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan tersebut memastikan bahwa penyusunan Renja dilakukan secara sistematis, terarah, dan konsisten dengan visi pembangunan jangka panjang dan menengah. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan, Renja 2026

diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Hubungan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 1.3**  
**Bagan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan terhadap Renja Tahun 2026**



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Renja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali memberikan gambaran tentang program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam satu tahun anggaran untuk menuju terwujudnya tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, serta untuk peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program/kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya Renja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang bertujuan untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan memantau kebijakan pembangunan daerah, Bappeda perlu menyusun Renja yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra), serta mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam RKP dan RKPD.

Dengan demikian tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 adalah:

- Menjabarkan Renstra Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 terutama pada Tahun 2026.
- Sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026.
- Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Renstra Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat:

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat:

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk: 1) mengetahui realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau sudah terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input*, *output*, dan *outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *output*nya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali selama Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Tahun 2025.

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025. Pada Tahun 2024 total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. 24.679.084.089,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 22.045.367.591,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.633.716,498,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 20.812.588.026,00 (84,33%), sedangkan untuk capaian kinerja fisik keuangan pada tahun berjalan yaitu Tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan optimis sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja fisik keuangan tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja fisik keuangan tahunan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Tahun 2024-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2025 ditampilkan sebagaimana Tabel 2.1, sementara capaian realisasi fisik keuangan serta permasalahannya secara detail ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Outcome :</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi <b>Indikator Outcome :</b> Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 86,50 (100%)	Nilai 86,93	Nilai 87,13 (100%)	Nilai 86,24	100%	Nilai 87,15 (100%)		
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Output :</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Indikator Output :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	28 dokumen	53,57%
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	11 dokumen	5 dokumen	45,45%
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	15 laporan	9 laporan	60%
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-	-
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Output : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Indikator Output : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>100%</b>	<b>3 jenis</b>	-	<b>36,59%</b>
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	59 Orang/bulan	64 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100%	62 Orang/Bulan	62 Orang/Bulan	29,20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01.1.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 dokumen	1042 dokumen	540 dokumen	1042 dokumen	192,96%	1000 dokumen	472 dokumen	47,20%
5.01.01.1.02.0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	14 dokumen	8 dokumen	57,14%
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Output : Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
		<b>Indikator Output : Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48 jenis</b>				<b>100%</b>	<b>51 jenis</b>	<b>23 jenis</b>	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-	0%
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	4 paket	8 paket	4 paket	100%	7 paket	4 paket	40%
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	3 paket	1 paket	33,33%
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket	100%	1 paket	-	0%
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Output : Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan</b> <b>Indikator Output : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>2 jenis</b>				<b>66,67%</b>	<b>3 jenis</b>	-	0%
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	-	3 paket	-	0,00%	2 paket	-	0%
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	2 unit	1 unit	2 unit	100%	1 unit	-	0%
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Output : Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Indikator Output : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 laporan</b>				<b>100%</b>	<b>8 laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>50%</b>
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	3 laporan	1 laporan	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Output : Tersedianya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b> <b>Indikator Output : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>227 unit</b>	<b>227 unit</b>	<b>227 unit</b>	<b>227 unit</b>	<b>227 unit</b>	<b>227 unit</b>	<b>47 unit</b>	<b>20,70%</b>
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	32 unit	31 unit	32 unit	100%	31 unit	12 unit	38,71%
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 unit	120 unit	201 unit	120 unit	85,71%	190 unit	34 unit	17,89%
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	1 unit	16,67%
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
		<b>Indikator Outcome : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Ketentuan yang berlaku								
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<b>Output :</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi  <b>Indikator Output :</b> Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 dokumen				100%	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	100%	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>Output :</b> Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah								
		<b>Indikator Output :</b> Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah	6 dokumen				100%	7 dokumen	4 dokumen	57,14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		<b>Daerah</b>								
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<u>Indikator Tahun 2023 :</u> Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)  <u>Indikator Tahun 2024-2026 :</u> Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	6 masukan	6 Dokumen	6 masukan	100%	6 dokumen	4 dokumen	66,67%
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	0 buku	0%
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Output : Tersusunnya Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku</b>								
		<b>Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan</b>	<b>42 dokumen</b>				<b>100%</b>	<b>41 dokumen</b>	<b>18 dokumen</b>	<b>43,90%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		<b>berlaku</b>								
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	2 laporan	25%
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	3 laporan	50%
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	18 dokumen	19 dokumen	27 dokumen	19 dokumen	100%	27 dokumen	13 dokumen	48,15%
<b>5.01.02.1.04</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Output : Tersusunnya Dokumen Data SIPD</b>  <b>Indikator Output : Jumlah Dokumen Data SIPD</b>	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>100%</b>	1 dokumen	-	<b>0%</b>
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	<b>0%</b>
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Indikator Tahun 2023 :</b>  <b>Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Peringkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>100%</b>						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		100%						
		Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%						
		<u>Indikator Tahun 2024-2025 :</u> Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	100%	100%		
		<u>Indikator Tahun 2026-2030 :</u> <u>Outcome :</u> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  <u>Indikator Outcome :</u> Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%							
		<u>Outcome :</u> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		<b>Indikator Outcome :</b> Persentase Keselarasan RKPD Pembangunan Manusia dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%							
		<b>Outcome :</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  <b>Indikator Outcome :</b> Persentase Keselarasan RKPD Pembangunan Manusia dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%							
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Output :</b> Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
		<b>Indikator Output :</b> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Output : Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>  <b>Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>0%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Output : Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>								
		<b>Indikator Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>0%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2024 (Tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	0%

**Tabel 2.2 Realisasi fisik Keuangan Renja 2024 serta permasalahannya**

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.101.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.957.600,00	197.745.200,00	100	100	100	96.01	8.212.400,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan beberapa belanja mengalami negosiasi
5.01.01.101.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.059.800,00	6.096.400,00	100	100	100	86.35	963.400,00	Realisasi keuangan tidak 100% karena adanya negosiasi harga pada aplikasi LPSE
5.01.01.101.03	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.171.800,00	5.323.000,00	100	100	100	86.25	848.800,00	Realisasi keuangan tidak 100% karena adanya negosiasi harga pada aplikasi LPSE
5.01.01.101.04	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	7.823.500,00	7.024.900,00	100	100	100	89.79	2.215.950,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan.
5.01.01.101.05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.819.500,00	827.400,00	100	100	100	45.47	992.100,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan.

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.101.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.043.600,00	381.200,00	100	100	100	18.65	1.662.400,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5.01.01.101.06	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.151.100,00	1.791.400,00	100	100	100	43.15	2.359.700,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5.01.01.102.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.762.247.117,00	12.110.160.357,00	100	99.80	100	94.89	652.086.761,00	Ada beberapa PNS yang pensiun
5.01.01.102.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	198.206.700,00	195.213.250,00	100	100	100	98.49	2.993.450,00	
5.01.01.102.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	129.454.120,00	124.368.970,00	100	100	100	96.07	5.085.150,00	
5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.301.940,00	58.385.465,00	100	100	100	98.45	916.475,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.147.266.840,00	750.603.340,00	100	100	100	65.43	396.663.500,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.323.140,00	116.507.140,00	100	100	100	94.47	6.816.000,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.273.940,00	47.594.024,00	100	100	100	70.75	19.679.700,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.006.140,00	60.866.140,00	100	100	100	93.63	4.140.000	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.682.140,00	44.909.640,00	100	100	100	43.31	58.772.500,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681.550.140,00	348.374.385,00	100	100	100	51.12	333.175.755,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.08	Pengadaan Mebel	183.600.000,00	179.000.000,00	100	0,00	100	97,49	4.600.000,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.106.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.812.940,00	45.722.140,00	100	100	100	97.67	1.090.800,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.158.535,00	12.660.535,00	100	100	100	96,22	498.000,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	337.282.140,00	180.639.335,00	100	97,63	100	53,56	156.642.805,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558.540.160,00	551.521.960,00	100	100	100	98.74	7.018.200,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	874.255.504,00	596.888.751,00	100	100	100	68.27	277.366.753,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.132.140,00	85.165.340,00	100	78,34	100	49.19	87.966.800,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.463.688.638,00	909.527.981,00	100	86,27	100	62.14	554.160.157,00	Adanya negosiasi dan sesuai aliran kas
5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.800.000,00	9.800.000,00	100	100	100	100	-	-
5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	69.800.000,00	69.800.000,00	100	100	100	100	-	-
5.01.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.648.318.140,00	1.201.864.946,00	100	98,83	100	72.91	446.453.194,00	-
5.01.02.102.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	100	100	100	83.60	84.699.633,00	-

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	21.972.800,00	14.149.500,00	100	100	100	64.40	7.823.300,00	-
5.01.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	185.962.200,00	100.390.039,00	100	100	100	53.98	85.572.161,00	-
5.01.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	100	100	100	74.50	133.737.807,00	-
5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	142.122.400,00	110.364.000,00	100	100	100	77.65	31.758.400,00	-
5.01.02.104.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	61.611.240 ,00	61.740.680 ,00	100	100	100	91.32	5.870.560,00	-
5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	157.977.880,00	108.477.282,00	100	99.93	100	68,67	49.500.598,00	Sesuai dengan kebutuhan

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.283.540,00	60.036.140,00	100	99.88	100	59.87	40.247.400,00	Sesuai dengan kebutuhan
5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	100	99,85	100	72.67	73.740.186,00	- Menyesuaikan dengan HPS yang ditentukan - Adanya selisih harga Pengehentian Pembayaran belanja honorarium tim
5.01.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	100	97.61	100	73.09	62.152.932,00	Sesuai dengan kebutuhan
5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	257.211.560,00	213.147.434,00	100	93,79	100	82.87	44.064.126,00	Adanya negosiasi harga dan Menyesuaikan dengan aliran kas

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	255.433.420,00	202.911.322,00	100	100	100	79,44	52.522.098,00	Sesuai penugasan dan negosiasi harga
5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.112.240,00	76.646.682,00	100	92,98	100	79,75	19.465.558,00	Sesuai penugasan dan negosiasi harga
5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	199.753.680,00	138.670.202,00	100,00	100	100,00	69,42	61.083.478,00	Sesuai penugasan dan negosiasi harga
5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	297.898.540,00	285.906.670,00	100	100	100	95,97	11.991.870,00	Efisiensi harga dan mengikuti dengan undangan rapat
5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	71.334.800,00	46.375.600,00	100	100	100	65,01	24.959.200,00	Terdapat efisiensi harga pada tahapan pengadaan

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Biaya 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)				Sisa Anggaran (Rp.)	Permasalahan Dan Keterangan Lain
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	259.548.300,00	231.438.481,00	100	99,99	100	89,17	28.109.819,00	Sesuai dengan kebutuhan
5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	73.359.000,00	56.125.962,00	100	99,96	100	76,51	17.233.038,00	Sesuai dengan kebutuhan
		<b>24.679.084.089,00</b>	<b>20.812.588.026,00</b>	<b>100</b>	<b>98.70</b>	<b>100</b>	<b>84.33</b>	<b>3.866.496.064,00</b>	

Dari Tabel 2.1 diatas, diketahui bahwa Capaian Anggaran Sub Kegiatan adalah proses evaluasi untuk memahami sejauh mana program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Total anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebesar Rp24.679.084.089,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.812.588.026,- sehingga memperoleh hasil capaian sebesar 84.33%. Tidak tercapainya 100% pada capaian anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024.
- Adanya selisih harga yang diberikan oleh pihak penyedia barang/jasa.
- Adanya kekurangan waktu pelaksanaan pada belanja modal bangunan gedung kantor, dimana fisik pekerjaan hanya 85% tercapai diakhir tahun anggaran 2024, sehingga pembayaran hanya sebesar 80%.
- Adanya beberapa belanja yang tidak bisa terlaksana karena kekurangan pagu belanja.

Adapun realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebesar 84,33%, mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam efektivitas penyerapan anggaran. Akan tetapi dilihat dari tercapainya kinerja 100% pada Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa selisih sebesar 15% tersebut tidak mengorbankan target kinerja Pembangunan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali masih berorientasi kepada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal, dengan indikator kinerja yang memiliki bobot relatif lebih tinggi. Hal ini bermakna tanggung jawab yang lebih besar

dari sekedar pengkoordinasian penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan. Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran/Indikator Sasaran, serta Target Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran/Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Target 2024
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal  <b>Indikator:</b> Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Indikator:</b> Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%
	2. Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Indikator:</b> Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%

Dengan menetapkan persentase capaian kinerja pembangunan daerah sebagai indikator tujuan, mengandung arti bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tanggung jawab terhadap hasil penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan. Kualitas suatu dokumen perencanaan diukur dari tingkat keberhasilan capaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Dokumen tersebut disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Visi Misi tersebut telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Selanjutnya

dokumen tersebut dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renja PD) dan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja yang bermuara pada Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Hal ini sesuai fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyusun kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan. dimana sesuai Ketentuan Umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian. dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah”. Adapun sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan sasaran dan indikator ini memiliki makna bahwa suatu perencanaan yang berkualitas dapat diukur dari tercapainya target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Bahwa dokumen perencanaan tersebut tidak disusun dengan sembarangan, melainkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya. Isu-isu pembangunan telah dikaji dan dianalisis oleh tim yang berkompeten untuk meminimalisir pengaruhnya terhadap tidak tercapainya target pembangunan yang diharapkan.

Sesuai tabel di atas maka Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	92.58	92.58
Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	96.65	96.65

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali kewajiban membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahapan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi merupakan tahap akhir dalam pengukuran kinerja, tahapan ini dimulai dari menghitung nilai capaian kinerja dari semua pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan yang didasarkan atas nilai capaian kegiatan, sedangkan pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Bali Tahun 2024 hanya sampai pada hasil saja, mengingat untuk mengukur benefit (outcome) dan impact (capaian makro), memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan penelitian.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Bali menetapkan tujuan yang berorientasi kepada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan daerah, dengan indikator “Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan Daerah” yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Perencanaan  
Pembangunan Daerah tahun ke n}}{\text{Target Kinerja Perencanaan Pembangunan  
Daerah tahun ke n}} \times 100\%$$

Hasil capaian Kinerja Tahun 2024 setelah dihitung dengan formula dan data nilai capaian realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 mendapatkan hasil sebesar 92,58%. Tidak tercapai target kinerja 100% dikarenakan oleh beberapa faktor:

- Realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap dan keterbatasan dana yang menghambat pencapaian target.
  - Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target, sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.
  - Adanya sub kegiatan yang dihapuskan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.
  - Realisasi belanja yang tidak tercapai target karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan seperti (Belanja Listrik, Air dan Telepon).
2. Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator “Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD tahun berkenan}}{\text{Program RPD yang harus dilaksanakan  
tahun berkenan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah program pada RKPD tahun 2024 sebanyak 179 program dengan jumlah program pada RPD Provinsi Bali yang harus dilaksanakan Tahun 2024 sebanyak 173 program, sehingga didapatkan hasil 96.65%. Tidak tercapainya target kinerja 100% dikarenakan adanya pengurangan atau penambahan jumlah program yang disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap prioritas daerah, adanya perubahan kebijakan strategis yang memerlukan penyesuaian jumlah program. Alasan terhadap penambahan 2 program baru, dikarenakan terdapat pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023. Predikat katagori capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, capaian Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024 masuk dalam katagori Sangat tinggi. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sangat tergantung dari capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana dari perencanaan itu sendiri.

Dalam mengukur keberhasilan target kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali juga mengukur capaian indikator kinerja urusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dalam Dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali (Tabel 8.2) disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan**  
**Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/ *impact*) Pemerintah**  
**Daerah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
<b>Penunjang Urusan</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan:RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program APBD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{kesesuaian program atau pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan**  
**Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/ *impact*) Pemerintah**  
**Daerah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja
<b>Penunjang Urusan</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan. Kondisi ini akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Dinamika regulasi terkait perencanaan pembangunan sering mengalami perubahan/penyempurnaan**, Perubahan regulasi perencanaan (undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman teknis) yang terlalu cepat dan tidak terkoordinasi menyebabkan inkonsistensi dokumen perencanaan, kebingungan implementasi, dan pemborosan anggaran akibat revisi berulang.
- b. **Lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah**, menyebabkan program pembangunan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun kebutuhan lokal.
- c. **Koordinasi lintas sektor dan stakeholders yang belum optimal**, mengakibatkan tumpang tindih program, alokasi sumber daya tidak efisien, dan ketidak terpaduan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD).
- d. **Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah**, menyebabkan tidak adanya pembelajaran untuk perbaikan perencanaan tahun berikutnya sehingga terjadi kesalahan serupa yang berulang.
- e. **Ketidakselarasan pemahaman antar-perangkat daerah terhadap tujuan pembangunan provinsi**, mengakibatkan program sektoral yang tumpang tindih, ego sektoral, dan sulitnya mencapai target RPJMD secara kolektif.
- f. **Kompetensi sumber daya manusia di bidang perencanaan belum optimal**, keterbatasan kompetensi SDM dalam penyusunan perencanaan serta rendahnya literasi teknologi (*big data*, GIS, *artificial intelligence*) akan menghambat penyusunan perencanaan pembangunan yang adaptif dan inovatif.
- g. **Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif**, dapat disebabkan karena minimnya transparansi, janji program yang tidak terealisasi, dan partisipasi yang bersifat formalitas.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Bali diharapkan dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas perencanaan teknokratik, peningkatan kapasitas SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam upaya menghadapi permasalahan dan tantangan di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan implementasi, harus fokus dan berorientasi kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
- b. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Program follow Result*).
- c. Penerapan anggaran berbasis kinerja, hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya (*Money follow Program*).
- d. Percepatan capaian target pembangunan melalui pendekatan *multidisiplin dan lintas sektor* (Konvergensi).
- e. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa Isu Strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1. Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Kurang Sinergis.**
- 2. Program Pembangunan Daerah Belum Berdampak Optimal Kepada Masyarakat.**

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) bagi Perangkat Daerah Tahun 2026. Dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali juga merupakan landasan dalam penyempurnaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang akan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, serta pagu indikatifnya.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 akan dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026. Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2026 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal

Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan

Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan;  
Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata

Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi

Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi

Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

Adapun tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 adalah :

**“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL”**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan bidang perencanaan ikut mengawal pencapaian prioritas pembangunan ke-7 (tujuh) yaitu “**Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**”.

Selanjutnya reviu terhadap Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Rancangan RKPD Tahun 2026 ditampilkan seperti Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,17 Nilai	25.515.331.281,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,17 Nilai	25.579.958.781,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	202.853.922,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	202.853.922,00	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	140.046.372,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	140.046.372,00	
C	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.474.400,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.474.400,00	Terdapat 2 target capaian yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu penyelesaian administrasi dokumen DPA Tahun 2026 dan proses tahapan penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.589.390,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	12.589.390,00	Terdapat 2 target capaian yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 yaitu proses tahapan penyusunan Perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026 dan penetapan Perubahan DPA 2026
E	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	38.743.760,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	38.743.760,00	Penambahan 4 target berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Per TW
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>21.258.648.155,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>21.258.648.155,00</b>	
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	21.143.581.663,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	21.143.581.663,00	
B	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	35.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	35.000.000,00	
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	80.066.492,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	80.066.492,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Timur, Sumerta Kelod					Timur, Sumerta Kelod				
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima</b>	<b>100 %</b>	<b>1.410.015.296,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima</b>	<b>100 %</b>	<b>1.412.486.896,00</b>	
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.445.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.445.400,00	
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	414.945.692,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	414.945.692,00	
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.591.404,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	129.063.004,00	Adanya penambahan kebutuhan pagu sebesar Rp. 2.471.600,00 untuk belanja sewa alat kantor lainnya berupa sewa tenda
D	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.563.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.563.800,00	
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.628.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	29.628.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kelod					Kelod				
F	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.700.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.700.000,00	
G	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	701.141.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	701.141.000,00	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>135.484.092,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>145.484.092,00</b>	
A	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	75.329.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	75.329.000,00	
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	60.155.092,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70.155.092,00	Adanya penambahan kebutuhan pagu sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa keranjang sampah
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>841.391.864,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>893.547.764,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.061.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.061.500,00	
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197.266.492,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197.266.492,00	
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	641.063.872,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	693.219.772,00	Adanya penambahan kebutuhan pagu sebesar Rp 52.155.900,00 untuk memenuhi belanja berikut: - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa alat dan bahan kebersihan - jasa angkut sampah
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	<b>100 %</b>	<b>1.666.937.952,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	<b>100 %</b>	<b>1.666.937.952,00</b>	
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	697.766.460,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	697.766.460,00	
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	179.105.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	179.105.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Denpasar Timur, Sumerta Kelod					Denpasar Timur, Sumerta Kelod				
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	790.066.492,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	790.066.492,00	
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>5.915.234.718,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan yang Berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>4.861.774.016,00</b>	
1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.875.000.000,00</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.989.066.492,00</b>	
A	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	75.000.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	46.007.200,00	
B	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	200.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	83.384.600,00	
C	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2 Dokumen	2.600.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2 Dokumen	1.859.674.692,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Daerah Provinsi	Kecamatan, Semua Kel/Desa	(RPJPD/RPJMD/RKPD)			Pembangunan Daerah Provinsi	Kecamatan, Semua Kel/Desa	(RPJPD/RPJMD/RKPD)			
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.198.216.916,00</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.479.641.032,00</b>	
A	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	1.137.107.716,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	1.450.299.432,00	Adanya penambahan pagu untuk menunjang kegiatan Rakor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Seluruh Provinsi Bali
B	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	61.109.200,00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	29.341.600,00	
3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.639.648.102,00</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.240.066.492,00</b>	
A	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	301.791.270,00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	301.791.270,00	
B	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	931.243.786,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	631.662.176,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa					Kel/Desa				
C	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	18 Dokumen	406.613.046,00	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	18 Dokumen	306.613.046,00	
4	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>202.369.700,00</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Validitas Data Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>153.000.000,00</b>	
A	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	202.369.700,00	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	153.000.000,00	
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.548.667.268,00</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	
1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>883.002.584,00</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000,00</b>	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	173.029.700,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	151.719.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	140.339.600,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	125.989.568,00	
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	237.392.392,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	210.180.340,00	
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	332.240.892,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	262.110.392,00	
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>694.810.584,00</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000,00</b>	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	205.064.192,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	205.064.192,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	217.455.892,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	217.455.892,00	
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	188.714.800,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	213.904.216,00	
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	83.575.700,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	113.575.700,00	
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>970.854.100,00</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Keselarasan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000,00</b>	
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	406.292.400,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	187.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
B	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	107.085.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	187.500.000,00		
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350.409.100,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	187.500.000,00		
D	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	107.067.600,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	187.500.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>33.979.233.267,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>32.691.732.797,00</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi/dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Sementara dari hasil Forum yang telah pada tanggal 27 Februari 2025, belum terdapat adanya usulan program dan kegiatan yang masuk ke dalam Rencana Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Tahun 2026.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, program dan kegiatan Bappeda Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyelarasan ini bertujuan agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung tema RKP 2026 yaitu *“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”*.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, tetapi juga mendukung capaian sasaran Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial, dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas penyelenggaraan urusan fungsi penunjang perencanaan di daerah.

Tujuan perangkat daerah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan disusun untuk memperjelas penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, serta selaras dengan RPJMD Semesta Berencana sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Perencanaan memegang peranan yang cukup sentral dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana komponen perencanaan menyumbang bobot penilaian tertinggi, yaitu sebesar **30%**. Hal ini menekankan pentingnya kualitas perencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang memiliki *core business* 1) Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Mengendalikan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, dan 3) Mengevaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, maka dibutuhkan suatu sistem perencanaan yang handal dan mengacu kepada prinsip perencanaan sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada. Perencanaan yang handal merupakan kunci keberhasilan suatu pembangunan, perencanaan memberi arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan.

Perencanaan memberikan pedoman dan gambaran apa yang akan dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan mengurangi ketidakpastian, karena dengan membuat suatu perencanaan, kita dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Perencanaan yang baik dapat mengurangi atau meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efisien dan mengidentifikasi serta menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan

inefisiensi. Perencanaan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengontrolan dan pengevaluasian.

Dalam rangka mendukung Tujuan ke-7 RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, yaitu “*Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*”, dengan sasaran pertama yaitu “*Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, di mana salah satu indikator sasarnya adalah “*Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Provinsi Bali*”, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Bali berperan strategis dalam mengawal kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan selaras dengan tujuan strategis daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka **tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali** adalah:

**“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.”**

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”. Secara lebih detail akan ditampilkan sesuai tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target 2026</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Indikator:</b> Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Provinsi Bali	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Indikator:</b> Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%
	2. Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Indikator:</b> Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2026 sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan yang mengampu 3 (tiga) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 (dua) Program yang mendukung prioritas pembangunan daerah yaitu Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang program kerja di Tahun 2026 berjumlah 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dirancang seperti tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Provinsi Bali Tahun 2026**

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1		2		3	
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>PERENCANAAN</b>					
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Mebel

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1		2		3	
				2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik
				2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
				3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
		2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				2.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
		3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
				2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1		2		3	
				3.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		3.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1		2		3	
				2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan di daerah, dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Kualitas perencanaan yang baik dapat memberikan pedoman dan gambaran apa yang akan dilakukan organisasi, meminimalisir pemborosan, serta memberikan proses kerja yang terarah dan terencana dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali menyusun Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down* dan pendekatan tematik, *holistic*, *integrative*, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir.

Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah, ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali**  
**Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					32.691.732.797,00						35.371.863.576,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					32.691.732.797,00						35.371.863.576,00			
	5	01				PERENCANAAN					32.691.732.797,00						35.371.863.576,00			
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			87,17 Nilai	25.579.958.781,00						-	28.137.954.657,00	
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			34 Dokumen	202.853.922,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	-	223.139.314,00	
	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	140.046.372,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		154.051.009,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	11.474.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		12.621.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	12.589.390,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		13.848.329,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20 Laporan	38.743.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		42.618.136,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Jenis	21.216.048.155,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	-	23.337.652.970,00	
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/ Bulan	21.086.981.663,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		23.195.679.829,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	69.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		75.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyeludupan.					
	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					14 Dokumen	60.066.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali		66.073.141,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			48 Jenis	1.412.486.896,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.553.735.585,00	
	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	33.445.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		36.789.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					7 Paket	414.945.692,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		456.440.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	129.063.004,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		141.969.304,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	37.563.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		41.320.180,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	29.628.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		32.590.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	66.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		73.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	701.141.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		771.255.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	-		2 Jenis	145.484.092,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	160.032.501,00	
	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	75.329.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		82.861.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	70.155.092,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		77.170.601,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															dan penyeludupan.						
	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8 Laporan	893.547.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	982.902.540,00		
	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.061.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.367.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	197.266.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		216.993.141,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	693.219.772,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		762.541.749,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	-			227 Unit	1.709.537.952,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.880.491.747,00	
	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					31 Unit	718.766.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		790.643.106,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															dan penyeludupan.						
	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					190 Unit	200.705.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		220.775.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	790.066.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		869.073.141,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	-			100 Persen	4.861.774.016,00							-	4.775.282.915,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	-			2 Dokumen	1.989.066.492,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	-	2.267.838.575,00	
	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	46.007.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		102.241.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi					1 Berita Acara	83.384.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		279.242.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1.859.674.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat		1.886.354.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				6 Dokumen	1.479.641.032,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	-	858.127.761,00	
	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	1.450.299.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		793.963.101,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	29.341.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		64.164.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	-		32 Dokumen	1.240.066.492,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	-	1.436.828.394,00	
	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	301.791.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		332.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	631.662.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		694.828.394,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				18 Dokumen	306.613.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	-			1 Dokumen	153.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	-	212.488.185,00	
	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota		212.488.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			100 Persen	2.250.000.000,00						-	2.458.626.004,00	
	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1 Dokumen	750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	825.000.000,00	
	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	151.719.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		166.891.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															penyeludupan.					
	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					1 Laporan	125.989.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		138.588.525,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	210.180.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		231.198.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	262.110.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		288.321.431,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1 Dokumen	750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	808.626.004,00	
	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				1 Dokumen	205.064.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		225.570.611,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	217.455.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		239.201.481,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	213.904.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		224.599.427,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 Laporan	113.575.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.254.485,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			1 Dokumen	750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, narkoba, judi,	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	825.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				1 Dokumen	187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		206.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		206.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				1 Dokumen	187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		206.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



#### 4.1 Analisis Perencanaan Responsif Berbasis Gender

Dalam upaya mewujudkan tujuan Perangkat Daerah dan mendukung terlaksananya Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali memiliki sumber daya yang memadai dan handal. Sesuai dengan susunan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) Bidang Urusan dan 1 (satu) Sekretariat, adapun kondisi SDM pada Tahun 2025 berdasarkan Posisi Jabatan dan Jenis Kelamin disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	4	-	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	2	-	2
<b>B. Pejabat fungsional tertentu</b>			
Fungsional Perencana Ahli Utama	1	-	1
Fungsional Perencana Ahli Madya	1	-	1
Fungsional Perencana Ahli Muda	8	5	13
Fungsional Perencana Ahli Pertama	2	3	5
Fungsional Pranata Humas Ahli Madya	1	-	1
Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	1	-	1
Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1
Fungsional Arsiparis Penyelia	1	-	1
Fungsional Arsiparis Terampil	1	-	1
Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	-	1
Fungsional Analisis SDM Aparatur	1	-	1

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
Ahli Muda			
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Penata Tk. I (III/d)	3	4	7
Penata (III/c)	2	1	3
Penata Muda Tk. I (III/b)	3	2	5
Penata Muda (III/a)	4	-	4
Pengatur Tk. I (II/d)	4	2	6
Pengatur (II/c)	1	-	1
Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
<b>D. PPPK</b>			
IX	28	23	51
V	5	3	8
<b>E. NON ASN</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>49</b>	<b>145</b>

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Agustus 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas, tercatat bahwa keterlibatan perempuan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mencapai **33,79%**. Angka ini mencerminkan tingkat partisipasi yang signifikan dari kaum perempuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah.

Ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai, termasuk dari perspektif gender, merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Melalui analisis gender, organisasi dapat menggali potensi dari keberagaman, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan produktif.

Adapun pengaruh keberagaman gender terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- **Inklusivitas Gender:** Keterlibatan perempuan dalam tim perencanaan berkontribusi pada peningkatan inklusivitas, sehingga

kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat dapat lebih terwakili dalam dokumen perencanaan.

- **Inovasi dan Kreativitas:** Keberagaman sudut pandang antara laki-laki dan perempuan membuka ruang bagi munculnya ide-ide baru dan solusi yang lebih inovatif terhadap tantangan pembangunan.
- **Efektivitas Komunikasi:** Perbedaan gaya komunikasi dan pendekatan kolaboratif antara gender dapat memperkaya dinamika tim, meningkatkan efektivitas dalam diskusi, pengambilan keputusan, hingga penyusunan dokumen perencanaan.

Dengan demikian, penerapan prinsip kesetaraan gender tidak hanya merupakan bentuk komitmen terhadap keadilan sosial, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mendukung prinsip 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dengan cara meminimalisasi belanja yang relatif kurang efektif, dan merencanakan program kegiatan sesuai skala prioritas dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 menjadi acuan bagi seluruh Bidang yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2026 memuat rencana kebijakan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2026;
2. Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;

3. Rencana Kerja Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang lebih detail sesuai dengan bidang tugas masing-masing, agar kedepannya dapat memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທາລິ ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ ທາລິ

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ທາລິ ກຽມບົດຄວາມ ທາລິ ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ - ທາລິ (ບໍລິຫານ) ກຽມບົດຄວາມ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ກຽມບົດຄວາມ

Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235) Telepon : (0361) 226974

Laman : www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el : bappeda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI

B.28.000.7.2.6/4994/SET/BAPPEDA

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiam Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025



- (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun ANggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8)
  14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
  16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);
  17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
  18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

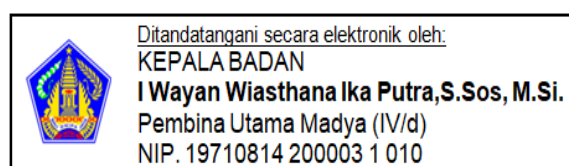


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
  - mengolah materi-materi dan menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
  - menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
- Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali, dan
- Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI  
NOMOR  
B.28.000.7.2.6/4994/SET/BAPPEDA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN  
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI


- Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : I Gusti Ayu Putu Dewiantari, S.Sos., M.Si., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
5. Dr. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si., Perencana Ahli Madya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.  
6. I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.



7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
9. I Gede Putu Dama Suyasa, SE., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
10. Agus Adi Darma Putra, S.Kom.,MM., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
11. Ni Ketut Ambara Putri Tjatera, S.T, M.T., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
12. Ni Putu Kristina Dewi, SE.,MM., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
14. I Komang Pasek Guna Wirawan, SE.MM., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
15. Dewa Ketut Yogiswara, SE., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
16. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
17. Made Dwi Putra Wiraguna, ST., M.Si, Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
18. I Putu Aryawan, ST., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
19. Ida Bagus Putrayasa, SE., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
20. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.Kom, M.Si., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
21. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos., Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.



- Staf Sekretariat : 5 (lima) orang staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali:
1. I Gusti Putu Satria Widnyana, S.IP., M.A.P.
  2. I Wayan Bayu Karisma, S.Kom.
  3. Komang Mandiyasa, SE.
  4. Yan Arie Pratama, S.Kom.
  5. I Gusti Made Ada Wimawan, S.P.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN  
**I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19710814 200003 1 010

